
DEKONSTRUKSI KEMITRAAN UNTUK REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Masri Dayu Misfalah¹, Sagita Fitriani Putri Ayu², Tia³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

email: masrymisfalah@gmail.com, putriayusagita75@gmail.com,

tiazai162@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:
kemitraan,
reformasi, tata
kelola
pemerintahan,
Indonesia

Artikel ini secara kritis mengkaji konsep 'kemitraan' yang ada di mana-mana dalam wacana bantuan pembangunan kontemporer. Ini menyelidiki apakah bahasa 'kemitraan' menandakan perubahan dalam hubungan bantuan dari penerahan kekuasaan yang mencolok yang merupakan karakteristik persyaratan tahun 1980-an dan 1990-an, atau, sebaliknya, apakah 'kemitraan' hanyalah penutup terbaru di balik kekuasaan- hubungan berbasis terus beroperasi. Kerangka konseptual memfasilitasi dekonstruksi 'Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola' yang baru-baru ini didirikan di Indonesia, yang diusulkan sebagai upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan nasional dan masyarakat internasional. Unsur kemitraan atau kekuasaan dicari melalui pemeriksaan struktur dan kegiatan pengambilan keputusan. Temuan ini sebagian besar retorik dan penggunaan 'kemitraan' instrumental oleh aktor internasional. Terlepas dari kontrol nominal oleh aktor-aktor Indonesia, badan-badan pembuat keputusan dibangun dengan cara yang memastikan bahwa agenda reformasi badan-badan internasional tetap relatif tidak tertandingi, baik dalam hal apa yang dimasukkan dan apa yang dikecualikan. Berbeda dengan wacana resmi tentang kemitraan yang mendorong strategi reformasi yang dirumuskan secara lokal, gagasan tentang 'kemitraan' dan 'kepemilikan lokal' secara bersamaan menyamarkan dan melegitimasi intervensi badan-badan internasional dalam proses reformasi domestik, yang membingungkan asimetri kekuasaan.

ABSTRACT

Keywords:
partnership,
reform,
governance,
Indonesia

This article critically examines the ubiquitous concept of 'partnership' in contemporary development aid discourse. It investigates whether the language of 'partnership' signifies a change in the relief relationship from the conspicuous exertion of power that was characteristic of the requirements of the 1980s and 1990s, or, conversely, whether 'partnership' is merely the latest cover behind power-based relationships continue to operate. The conceptual framework facilitates the deconstruction of the recently established 'Partnership for Governance Reform' in Indonesia, which was proposed as a collaborative effort between national stakeholders and the international community. The element of partnership or power is sought through an examination of decision-making structures and activities. These findings are largely rhetorical and the use of instrumental 'partnerships' by international actors. Despite nominal control by Indonesian actors, decision-making bodies are constructed in a way that ensures that the reform agendas of international bodies remain relatively unchallenged, both in terms of what is included and what is excluded. In contrast to the official discourse on partnerships which encourages locally formulated reform strategies, the notions of 'partnership' and 'local ownership' simultaneously disguise and legitimize the intervention of international bodies in domestic reform processes, confusing power asymmetry.

PENDAHULUAN

Hubungan antara Utara dan Selatan global umumnya dicirikan oleh perbedaan kekuasaan. Asimetri kekuasaan seperti itu terutama terlihat dalam hubungan 'bantuan' resmi antara lembaga bilateral dan multilateral dan negara-negara penerima di Selatan, khususnya dengan kondisi ekonomi yang terkait dengan pinjaman penyesuaian struktural dari awal 1980-an dan seterusnya dan politik persyaratan diperkenalkan pada 1990-an (Paddeu & Tams, 2022). Namun, dalam setengah dekade terakhir, konsep 'kemitraan' telah

muncul sebagai 'ide besar baru' dalam wacana bantuan pembangunan, yang digambarkan sebagai landasan reformulasi hubungan antara multilateral dan bilateral. lembaga dan negara penerima. Tidak mengherankan, skeptisisme telah diungkapkan mengenai, misalnya, tingkat kemitraan motivasi donor dan apakah pergeseran itu sebenarnya merupakan bentuk kebutuhan baru (Asadi, Orense, Asadi, & Pender, 2019).

Artikel ini berkonsentrasi pada masalah kemitraan dan kekuasaan. Ini menyelidiki apakah bahasa 'kemitraan' memang menandakan pergeseran nyata dalam hubungan bantuan dari penderahan kekuasaan yang mencolok yang merupakan karakteristik persyaratan tahun 1980-an dan 1990-an, atau, sebaliknya, apakah 'kemitraan' hanyalah penutup terbaru. di mana hubungan berbasis kekuasaan terus beroperasi. Artikel ini berorientasi konseptual dan empiris, dan terdiri dari empat bagian utama. Awalnya, munculnya 'kemitraan' dalam agenda pembangunan diperiksa dan dijelaskan. Selanjutnya, konsep 'kemitraan' dan 'kekuasaan' dieksplorasi untuk memberikan kerangka konseptual. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi konseptual ditelaah melalui studi kasus 'Partnership for Governance Reform' yang baru-baru ini didirikan di Indonesia. Akhirnya, berdasarkan temuan studi kasus, kesimpulan ditarik apakah gagasan 'kemitraan' memperkenalkan fase baru dalam hubungan bantuan yang ditandai dengan saling menghormati dan tujuan bersama, atau, sebagai alternatif, apakah hubungan kekuasaan tetap ada

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Neumann, pendekatan sentral adalah pendekatan yang berfokus pada realitas sosial, makna budaya, proses dan peristiwa interaktif, realitas menjadi alasan utama, penilaian tradisional dan transparan, teori citra dan data situs, analisis postmortem, analisis postmodern (Taufan, Ardisal, Damri, & Arise, 2018). Peneliti dan analisis partisipatif akan terus mengembangkan dan memperbarui penelitian kualitatif tentang konsep yang digunakan selama atau setelah proses pengumpulan data. Selain itu, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, majalah, peraturan, laporan artikel, dan literatur terkait berita. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Apa yang menjelaskan penggunaan istilah 'kemitraan' di mana-mana saat ini oleh badan-badan pembangunan resmi, dan apakah itu mewakili antitesis dari eksploitasi kolonial dan distorsi perang dingin, yang menunjukkan bahwa hubungan internasional antara Utara dan Selatan telah memasuki era baru kerjasama internasional untuk mempromosikan target perkembangan? Dua jenis penjelasan yang berbeda dapat ditawarkan. Yang pertama menyarankan tanggapan yang lebih pragmatis oleh para donor terhadap kekurangan yang dirasakan dalam kinerja bantuan, yang disimpulkan sebagai 'memungkinkan penggunaan sumber daya yang langka secara lebih efisien, meningkatkan keberlanjutan, dan meningkatkan partisipasi penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan untuk Reformasi Tata Pemerintahan di Indonesia

Transisi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Suharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi lembaga-lembaga internasional untuk terlibat dalam proses reformasi politik. Secara khusus, 'reformasi tata kelola' telah menjadi prioritas utama bagi para aktor eksternal, khususnya badan-badan pembangunan multilateral dan bilateral. Profil tertinggi dari kegiatan ini adalah Partnership for Governance Reform yang belum lama ini terbentuk di Indonesia (selanjutnya disebut Governance Partnership atau disingkat Partnership). Ini dimulai pada bulan September 1999 pada pertemuan Kelompok

Konsultatif oleh tiga organisasi multilateral, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ABD), dan peluncuran publiknya pada bulan Oktober 2000. Kemitraan Tata Kelola muncul secara global unik. .dalam dua cara. Salah satunya membutuhkan tingkat koordinasi oleh donor dan pemberi pinjaman internasional mengenai isu-isu demokrasi dan reformasi pemerintahan di suatu negara. Di sisi lain, kontrol nyata Indonesia atas Kemitraan, melalui partisipasi mayoritas Indonesia dalam Dewan Pemerintahan.

Kemitraan Tata Kelola diposisikan sebagai salah satu antara 'pemangku kepentingan nasional dan masyarakat internasional' (Dilla, Anwar, & Dipotmodjo, 2019). Materi publisitas secara resmi mengakui bahwa 'sistem pemerintahan tidak dapat diubah oleh praktik yang dipaksakan dari luar', dan lebih menekankan pada 'kepemilikan nasional' atas reformasi pemerintah, yang dikatakan sebagai 'kunci perubahan' (Situs web Kemitraan: 'Peran dan Fungsi'). Dengan demikian, pengaturan kemitraan disajikan sebagai manfaat ganda: Kemitraan tidak hanya 'menyatukan unsur-unsur dalam pemerintah Indonesia dan masyarakat yang berkomitmen untuk reformasi pemerintahan dan mempromosikan dialog dan jaringan di antara mereka' (Kemitraan, 2002: Lampiran 2); tetapi juga memungkinkan 'upaya Indonesia untuk mereformasi proses tata kelola [untuk] memanfaatkan pengalaman internasional dan praktik terbaik internasional' (Partnership, 2001, penekanan ditambahkan). Presentasi seperti itu, tentu saja, cocok dengan pergeseran umum dalam retorika donor dari persyaratan dan ke arah gagasan tanggung jawab lokal untuk rencana dan program pembangunan, seperti Komite Bantuan Pembangunan (OECD, 1996: 14), misalnya.

Informasi Kemitraan dengan tegas menyatakan bahwa, 'Untuk memastikan komitmen dan kepemilikan Indonesia yang kuat atas proses Kemitraan, proses Kemitraan dipimpin oleh Badan Pengurus yang terdiri dari aktor-aktor kunci Indonesia dalam proses reformasi, serta perwakilan dari komunitas internasional.' (Kemitraan, 2002: Lampiran 2). Dewan Pengurus dikatakan mewakili 'puncak' Kemitraan, termasuk memberikan 'panduan menyeluruh dan arah kebijakan yang jelas' (situs web Kemitraan: 'Peran dan Fungsi'). Namun Kemitraan memiliki struktur organisasi yang relatif kompleks, dengan setidaknya tiga badan pembuat keputusan: Dewan Pengatur, Dewan Eksekutif, dan Komite Kebijakan.

Ada dua wakil ketua DPD yang mewakili partai pemerintah dan non-pemerintah, masing-masing Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan Erna Witoelar, tokoh LSM yang diakui secara nasional dan anggota dari beberapa masyarakat sipil. organisasi. , termasuk Forum Lingkungan Hidup Indonesia. Menariknya, sebagai Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah di pemerintahan mantan Presiden Wahid, Erna Witoelar pada awalnya adalah co-chair pemerintah dan sejak itu berganti posisi. Dua kursi dicadangkan untuk anggota Kabinet Indonesia yang saat ini dijabat oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Anggota pemerintah lainnya di Dewan Pemerintahan saat ini termasuk Ketua Mahkamah Agung, bupati (yaitu pemimpin pemerintah kabupaten terpilih) dan pejabat tinggi pemerintah, misalnya Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementerian Luar Negeri.

Bentuk Dekonstruksi Kemitraan dalam Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Pertama, mengenai prosedur pemilihan, tampaknya tidak ada cara konstitusional dan terikat aturan di mana anggota Dewan dipilih, selain oleh Dewan yang duduk. Ini agak mengejutkan bagi sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik. Didirikan pada Mei 2000, Dewan Pengurus pada awalnya dibentuk oleh tiga lembaga multilateral melalui proses ad hoc undangan kepada individu-individu dalam pemerintahan Indonesia dan masyarakat yang relatif dekat dengan

mereka, yang pada gilirannya memiliki pengaruh dalam menasihati orang lain. Oleh karena itu Dewan yang terdiri dari individu-individu yang dipilih dengan cermat telah dibentuk, yang, dari perspektif badan-badan internasional, tidak mungkin menantang atau menumbangkan agenda reformasi yang moderat dan terkendali. Selanjutnya, keanggotaan Direksi ditinjau setiap tahun, dengan keanggotaan maksimal tiga tahun. Ketika lowongan muncul, anggota Dewan baru diusulkan, dibahas dan dipilih oleh anggota Dewan yang ada. Tidak ada ketentuan untuk pencalonan eksternal, misalnya pada rapat umum tahunan di mana Dewan, atau sebagian darinya, dipilih kembali oleh konstituen yang lebih luas dari mereka yang tertarik pada reformasi politik di Indonesia. Oleh karena itu, sedemikian rupa, kelompok yang relatif tertutup dan dekat dari individu-individu yang berpikiran sama telah diciptakan dan dipertahankan, dengan suara-suara yang lebih radikal dikecualikan. Analisis tersebut mempertanyakan komitmen aktor internasional untuk 'kemitraan' di bawah kendali nasional, dengan potensi untuk menegaskan agenda reformasi yang tidak sesuai dengan badan-badan internasional.

Kedua, kembali ke persoalan keterwakilan Badan Pimpinan, komposisinya menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah kedekatannya dengan pemerintah. Ada perwakilan pemerintah tingkat tinggi yang luas di Dewan, termasuk menteri Kabinet dan pejabat tinggi. Hal ini tampaknya membatasi sejauh mana Kemitraan dapat melakukan pemeriksaan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Terkait, ada relatif kurangnya representasi masyarakat sipil. Terlepas dari retorika wajib untuk memperkuat masyarakat sipil sebagai prioritas reformasi pemerintah, hanya sedikit organisasi masyarakat sipil yang benar-benar terwakili di Dewan, kecuali LSM advokasi politik baru yang muncul di masa transisi. Dengan demikian, peran advokasi penting dari organisasi masyarakat sipil, yang menekan pemerintah untuk melaksanakan reformasi, kurang dalam Kemitraan itu sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan penggambaran strategi reformasi milik lokal yang muncul dari dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, seperti yang digambarkan oleh DAC, misalnya (Kurniawati, 2020). Lebih jauh, hal ini kontras dengan peran pemimpin bisnis yang relatif berpengaruh melalui perwakilan sektor swasta yang signifikan, yang agak tidak nyaman dengan fokus Kemitraan Pemerintah yang seharusnya pada reformasi politik daripada reformasi ekonomi. Selain itu, tidak ada perwakilan serikat pekerja yang jumlah dan perannya di Indonesia berkembang pesat setelah transisi, dan sering dikaitkan dengan peran positif dalam demokratisasi (Mills et al., 2020). Tampaknya pandangan dari mereka yang dikucilkan dari kekuasaan di Indonesia sebagian besar tetap tidak terdengar dalam Kemitraan.

Beralih ke kegiatan Kemitraan, ini telah ditetapkan, pertama, melalui penetapan agenda dan identifikasi prioritas kerja dan, kedua, dengan pelaksanaan rencana kerja untuk setiap tema prioritas melalui dua lengan Kemitraan, 'Dialog Kebijakan dan Fasilitas Analisis' dan 'Dana Pemerintah Indonesia'. Proses-proses ini diperiksa secara bergantian, dengan pengertian tentang 'kemitraan' dan 'kepemilikan Indonesia' semakin terurai.

Demikian pula, reformasi konstitusi merupakan isu penting lainnya jika transisi menuju demokrasi ingin dikonsolidasikan. Konstitusi saat ini dirumuskan dengan tergesa-gesa selama persiapan kemerdekaan pada tahun 1945 dan umumnya dianggap tidak memadai untuk pemerintahan demokratis modern, karena memungkinkan negara untuk melakukan kontrol dalam semua aspek urusan sosial dan politik. Isu-isu kunci menyangkut proses dan isi reformasi konstitusi: siapa yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi, dan sejauh mana partisipasi rakyat harus dimasukkan dalam pertimbangan opsi; haruskah konstitusi diubah atau ditulis ulang sepenuhnya? Sekali lagi, kemajuan berjalan lambat, dengan beberapa ketidakpuasan diungkapkan tentang komitmen elit politik terhadap reformasi konstitusi.

Fasilitas ini dijuluki sebagai think-tank on governance issues, yang bertujuan untuk meneliti dan merumuskan kebijakan dan strategi isu reformasi pemerintahan di Indonesia. Tujuannya yang dinyatakan adalah untuk 'mendorong dialog nasional tentang pemerintahan, berdasarkan pengalaman internasional'. Dalam praktiknya, anggaran Fasilitas membayar untuk staf Kantor Eksekutif dan kegiatan yang mereka mulai, misalnya survei korupsi yang dilakukan dengan Bank Dunia, dan pembentukan kelompok kerja untuk mengeksplorasi isu-isu reformasi kepolisian. Di dalam Kantor Eksekutif, tim-tim kecil telah mengembangkan makalah strategi dan rencana kerja untuk tahun 2002 untuk setiap bidang prioritas. Niat sebelumnya dinyatakan untuk 'bekerja erat dengan divisi tata kelola lembaga internasional lainnya, khususnya UNDP, Bank Dunia dan ADB' (Partnership, 2001), dengan hubungan erat yang terlihat dari rencana kerja 2002. Misalnya, di bidang reformasi hukum dan peradilan dan reformasi pegawai negara, Kemitraan memberikan kontribusi kepada masing-masing Kelompok Kerja donor, yang dipimpin oleh Bank Dunia dalam kedua kasus, yang bertujuan untuk 'merumuskan kerangka kerja dan strategi donor bersama' untuk setiap sektor (Lestari, Nulhaqim, & Irfan, 2019).

Contoh lebih lanjut dari keterlibatan erat dengan donor meliputi: 'berkontribusi pada berbagai inisiatif Bank Dunia di bidang tata kelola perusahaan'; perencanaan 'penyelarasan (keterlibatan pelengkap) Kemitraan dengan kegiatan donor' dalam desentralisasi; dan terus memfasilitasi Kelompok Kerja donor untuk reformasi kepolisian (Kemitraan, 2002: Bagian B, Rencana Kerja Sektor Prioritas). Meskipun Kemitraan juga terlibat dalam kegiatan lain secara langsung dengan organisasi-organisasi Indonesia, interaksinya yang erat dengan badan-badan koordinasi donor internasional membatasi gagasan kepemilikan nasional dan meningkatkan pengaruh internasional secara keseluruhan terhadap upaya reformasi tata pemerintahan di Indonesia.

KESIMPULAN

Generalisasi contoh reformasi pemerintahan di Indonesia ini akan menunjukkan bahwa asimetri kekuasaan dalam hubungan Utara-Selatan, seperti yang diungkapkan melalui hubungan bantuan, tidak berubah secara signifikan, meskipun bahasa 'kemitraan' dan 'kepemilikan nasional' sedang populer hari ini. Di satu sisi, ada sedikit atau tidak ada indikasi unsur-unsur kemitraan sejati. Meskipun upaya untuk menciptakan kesan kontrol Indonesia, Kemitraan Pemerintahan masih didorong, dibentuk dan dipengaruhi oleh badan-badan internasional eksternal, sebagai lawan proses berdaulat di mana aktor nasional mengarahkan dan mengontrol program reformasi yang kemudian bersama-sama dilaksanakan sebagai tujuan bersama oleh internal dan aktor eksternal.

BIBLIOGRAFI

- Asadi, M. S., Orense, R. P., Asadi, M. B., & Pender, M. J. (2019). Maximum dry density test to quantify pumice content in natural soils. *Soils and Foundations*, 59(2), 532–543.
- Dilla, Muis, Anwar, Anwar, & Dipoadmodjo, Tenri S. P. (2019). Lingkungan Eksternal dan Internal Pengaruhnya terhadap Kemitraan dan Kinerja Usaha Kecil Makanan Mie di Provinsi Sulawesi Selatan. *Seminar Nasional LP2M UNM*.
- Kurniawati, Meta Ayu. (2020). The role of ICT infrastructure, innovation and globalization on economic growth in OECD countries, 1996-2017. *Journal of Science and Technology Policy Management*.
- Lestari, Rizki Bunga, Nulhaqim, Soni Akhmad, & Irfan, Maulana. (2019). Teamwork Pengembangan Kemitraan (Studi Kasus Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor). *Indonesian Journal of Social*

Science Education (IJSSE), 1(2), 191–212.

- Mills, Richael O., Abdullah, Mohammed R., Akwetey, Samuel A., Sappor, Dorcas C., Cole, Isaac, Baffuor-Asare, Michael, Bolivar, Johan A., Gámez, Gustavo, van der Linden, Mark P. G., & Hammerschmidt, Sven. (2020). Post-Vaccination *Streptococcus pneumoniae* carriage and virulence gene distribution among children less than five years of age, cape coast, Ghana. *Microorganisms*, 8(12), 1987.
- Paddeu, Federica I., & Tams, Christian J. (2022). Encoding the law of State responsibility with courage and resolve: James Crawford and the 2001 Articles on State Responsibility. *Cambridge International Law Journal*, 11(1), 6–23.
- Taufan, Johandri, Ardisal, Ardisal, Damri, Damri, & Arise, Arise. (2018). Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif bagi Anak dengan Hambatan Fisik dan Motorik. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 2(2), 19–24.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).